BAB IV

HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Kawnwil Jabar I

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda, dalam perang dunia I (1914-1918) keadaan keuangan seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga Negara terpaksa melakukan pemungutan pajak melalui sistem dan cara yang disesuaikan dengan Negara masing-masing. Pajak didirikan di Indonesia dengan nama Carlogo Veganes Blasting (Pajak Penghasilan). Pada zaman colonial Belanda, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh *De Inspectie Van Financian* yaitu badan yang mengurus pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara berdasarkan Undang-undang Kolonial Belanda.

Pada zaman penjajahan Jepang tepatnya tanggal 9 Maret 1942 *De Inspective Van Financian* diganti oleh suatu badan yang mengurus keuangan dibawah pemerintah Jepang yang bernama *Zaimu*, kemudian Jepang menyerah kepada sekutu, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka *Zaimu* diganti menjadi Inspeksi keuangan untuk seluruh kota Bandung, kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjaran. Khususnya untuk Inspeksi keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung Concordia (Sekarang Gedung Merdeka) yang berada di Jalan Raya Barat (Sekarang Jalan Asia Afrika).

Agresi Militer (1948) Ibu Kota Republik Yogyakarta diserbu dan mengakibatkan terjadinya perang yang dahsyat. Perundingan-perundingan dilakukan, Pemerintah Belanda mengakui Kemerdekaan republik Indonesia maka Inspeksi

Keuangan Bandung yag betempat di Jalan Asia Afrika Bandung namanya diubah menjadi Inspeksi Pajak. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengubah Inspeksi Pajak Bandung berdasarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1414/KMK.01/1979 tanggal 5 April 1979, Inspeksi Pajak tersebut menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, berkedudukan di Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung (Gedung Keuangan Negara), meliputi daerah wewenang kota Bandung bagian Timur dan Kabupaten Sumedang.

2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, sementara berkedudukan di Jalan Purnawarman no. 21 Bandung, Kemudian pada tahun 1981 pindah ke Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung yang meliputi daerah Majalaya, Kecamatan Cikalong Wetan dan Kotif Cimahi.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mulai tanggan 1 April 1994 terjadi reoorganisasi, dimana KPP yang ada di Kota dan kabupaten Badnung terdiri dari 5 KPP, diantaranya yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung

2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung

3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21 Bandung

4. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung

5. KPP Cimahi, Jalan Raya Barat No. 5774 Cimahi.

Kemudian pada bulan Agustus 2007 terdapat perubahan dari Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Kantor Pelayan Pajak, Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dari Karikpa menjadi satu dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri:

1. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hattano. 216 Bandung
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
5. KPP Cimahi, Jalan Raya Barat No. 5774 Cimahi
6. KPP Pratama Majalaya, Jalan Peta no.7 Bandung
7. KPP Pratama Soreang.

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

   Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

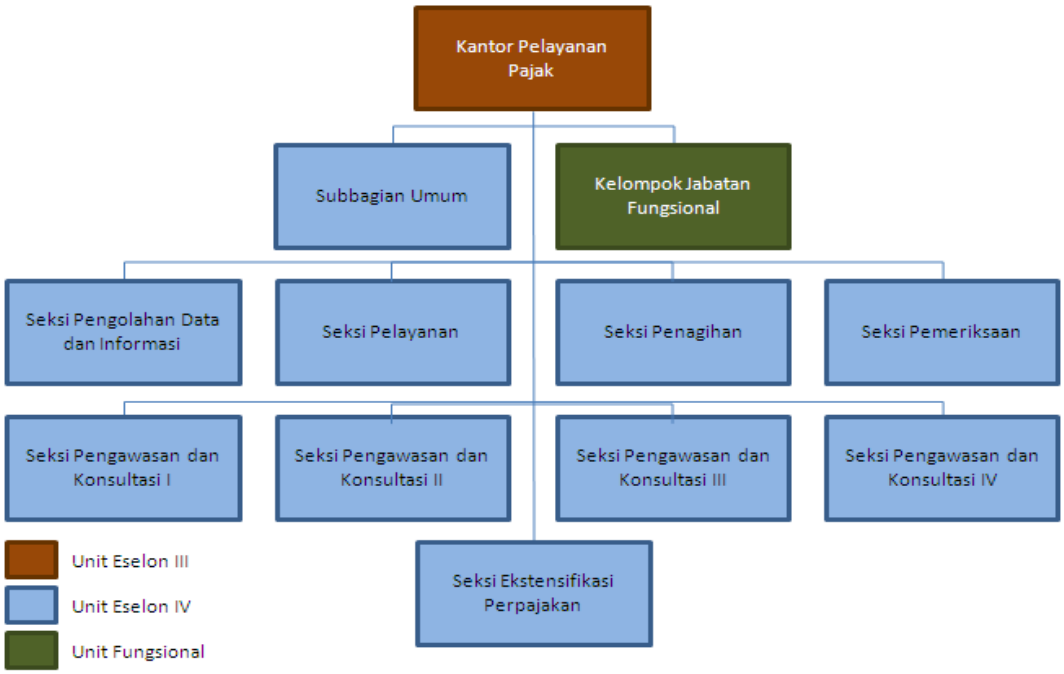
   a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
   b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan

mutakhir.

c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP Daerah Kanwil Jabar I Bandung



Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006, struktur orgasisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama,

2. Sub Bagian Umum;

3. Seksi Ekstensifikasi;
4. Seksi Pengolah Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.3 Jobs Description

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melakukan penyuluhan (pembinaan terhadap karyawan yang ada di dalam wewenang kekuasaannya);
   b. Melakukan peningkatan pelayanan;
   c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu:
      c.1. Pajak Penghasilan (PPh);
      c.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

c.3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

c.4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

c.5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan (BPHTB);

c.6. Pajak Tidak Langsung Lainnya.

d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian;

b. Melakukan urusan keuangan;

c. Melakukan urusan tata usaha; dan

d. Melakukan urusan rumah tangga (kantor).

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan pengamatan potensi perpajakan;

b. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak;

c. Melaksanakan penilaian objek pajak; dan

d. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mengolah data;

b. Menyajikan informasi perpajakan;

c. Merekam dokumen perpajakan;

d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;

e. Melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB;

f. Melaksanakan dukungan teknis komputer;

g. Melakukan pemantapan *e-SPT* dan *e-filling*; dan

h. Menyimpan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

b. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;

c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan dan surat lainnya;

d. Melakukan penyuluhan perpajakan;

e. Melaksanakan peregistrasian wajib pajak; dan

f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP);

b. Melaksanakan pembimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;

c. Melaksanakan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;

d. Merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;

e. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan prosedur keberatan;

f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;

g. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;

h. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile*;

i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;

j. Menganalisis kinerja wajib pajak; dan

k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pemeriksaan;

b. Melaksanakan pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan;

c. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak); dan

d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan penagihan aktif

b. Melaksanakan penagihan piutang pajak;

c. Penundaan angsuran tunggakan pajak;

d. Usulan penghapusan piutang pajak; dan

e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Pejabat Fungsional Penilai

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.2 Karakter Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Untuk variabel Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak, dan *Self Assesment System* kuesioner diberikan kepada responden yaitu petugas seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksaan. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis	Jumlah	Persentase
Pria	**21**	**70%**
Wanita	**9**	**30%**
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria berjumlah 21 orang atau sebesar 70% dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 9 orang atau sebesar 30%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Hal ini dikarenakan pegawai pria dinilai memiliki kecepatan kerja lebih baik dan pria lebih berani untuk melakukan pemeriksaan pajak pada wp dibandingkan wanita.

4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
< 1 tahun	**4**	**10%**
1 - 3 tahun	**4**	**10%**
4 - 5 tahun	**4**	**10%**
> 5 tahun	**18**	**70%**
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 70%, responden dengan masa kerja 4 – 5 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 10%, responden dengan masa kerja 1 – 3 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 10%, dan responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan masa kerja lebih dari 5 tahun. Hal tersebut menunjukkan mayoritas pegawai DJP khususnya pada seksi Pemeriksaan

memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap DJP, selain itu diperlukan pengalaman lebih untuk melakukan pemeriksaan.

4.3. Analisis Deskripsi Variabel

4.3.1 Analisis Deskripsi Pemeriksaan Pajak

Gambaran pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I

Variabel Pemeriksaan Pajak	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen (%)	Kriteria
1. Pendidikan dan pelatihan teknis	248	300	82,67	Baik
2. Integritas pemeriksa	226	300	75,33	Baik
3. Rasio Sumber Daya Manusia (SDM)	241	300	80,33	Baik
4. Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen	229	300	76,33	Baik
5. Konfirmasi kepada pihak ketiga	235	300	78,33	Baik
6. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan	238	300	79,33	Baik
7. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan	217	300	72,33	Baik
Total Skor Pemeriksaan Pajak (X)	1.639	2.100	77,81	Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Kurang baik (36,2%-52,3%)
e. Tidak baik (0,00%-36,10%)

Dari hasil angket yang diberikan responden pegawai di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kanwil Jabar I, menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak termasuk katagori baik, dengan skor aktual pemeriksaan pajak sebesar 77,81%, dari skor ideal.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi pemeriksaan pajak :

1. Pendidikan dan pelatihan teknis

Gambaran mengenai pelatihan dan keterampilan pemerksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelatihan dan Keterampilan Pemeriksaan Pajak

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Pelatihan dilakukan di Divisi dalam setahun	F %	12 40,0	13 43,3	3 10,0	2 6,7	0 0,0	125	150	83,33
2	Mengikuti seminar dalam satu tahun	F %	10 33,3	15 50,0	3 0,0	2 6,7	0 0,0	123	150	82,00
	% Skor Aktual Pelatihan dan Keterampilan Pemeriksaan Pajak							248	300	82,67

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk dimensi pelatihan dan keterampilan pemeriksaan pajak sebesar 82,67% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pelatihan dan keterampilan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk dimensi pelatihan dan keterampilan pemeriksaan pajak dijelaskan sebagai berikut :

1). Pelatihan dilakukan di Divisi

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pelaksanan pelatihan di Divisi sebesar 83,33%, termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya, pelatihan di Divisi dilakukan lebih dari 3 kali dalam setahun

2). Meninguti Seminar

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator mengikuti seminar sebesar 82,00%, termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya, seminar yang dikuti oleh petugas pemeriksa pajak dalam satu tahun dilaksanakan lebih dari 3 kali dalam satu tahun

2. Integritas Pemeriksa

Gambaran mengenai integritas pemeriksa pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Integritas Pemeriksa

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Pemeriksa bersikap jujur, sopan dan objektif	F %	6 20,0	14 46,7	4 13,3	6 20,0	0 0,0	110	150	73,33
2	Pemeriksa terindikasi tidak jujur, tidak sopan dan tidak objektif	F %	4 13,3	21 70,0	2 6,7	3 10,0	0 0,0	116	150	77,33
	% Skor Aktual Integritas Pemeriksa							226	300	75,33

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas kedua butir pernyataan yang membentuk dimensi integritas pemeriksa sebesar 75,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya integritas pemeriksa pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I pada umumnya memupunyai integritas yang baik. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk dimensi integritas peeriksa dijelaskan sebagai berikut :

1). Besikap jujur, sopan dan objektif

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator sikap pemeriksa dalam menjalankan tugasnya sebesar 73,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, dalam menjalankan tugasnya pemeriksa bersikap jujur, sopan dan objektif

2). Indikasikan pemeriksa tidak bersikap jujur, tidak sopan dan tidak objektif

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator indikasi pemeriksa tidak bersikap jujur, tidak sopan dan tidak objektif sebesar 77,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, data dalam pemeriksaan pajak petugas telah melaksanakan dengan bersikap jujur, sopan dan objektif

3. Rasio Suber Daya Manusia (SDM)

Gambaran mengenai rasio SDM pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Rasio SDM

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Jumlah pemeriksaan lebih dari jumlah pemeriksa	F %	4 13,3	24 80,0	1 3,3	1 3,3	0 0,0	121	150	80,67
2	Pemeriksaan dilakukan beberapa kali dalam satu tahun	F %	9 30,0	15 50,0	3 10,0	3 10,0	0 0,0	120	150	80,00
	% Skor Aktual Rasio SDM							241	300	80,33

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi rasio SDM sebesar 80,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya rasio SDM pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar

I pada umumnya jumlah pemeriksaan pajak hampir sebanding dengan jumlah pemeriksa. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk dimensi rasio SDM dijelaskan sebagai berikut :

1). Jumlah Pemeriksaan dan Jumlah Pemeriksa

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah pemeriksa sebesar 80,67%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, jumlah pemeriksaan pajak sebanding dengan jumlah petugas pemeriksa

2). Frekuensi pemeriksaan dalam setahun

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator frekuensi pemeriksaan dalam setahun sebesar 80,00%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, frekuensi pemeriksaan dilakukan lebih tiga kali dalam setahun.

4. Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen

Gambaran mengenai pemeriksaan buku, catatan dan dokumen pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Pemeriksaan sesuai prosedur	F	3	13	1	1	0	104	150	69,33
		%	10,0	80,0	3,3	3,3	0,0			
2	WP menolak meminjam-kan dokumen dan catatan	F	9	15	3	3	0	125	150	83,33
		%	30,0	50,0	10,0	10,0	0,0			
	% Skor Aktual Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen							229	300	76,33

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi pemeriksaan buku cacatan dan dokumen sebesar 76,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pemeriksa dalam pemeriksaan pajak difokuskan pda pemeriksaan buku, catatan dan dokumen sesuai prosedur pemeriksaan. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dijelaskan sebagai berikut :

1). Prosedur pemeriksaan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator prosedur pemeriksaan sebesar 69,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, prosedur pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan, seperti pemeriksaan terhadap buku, catatan dan dokumen

2). Penolakan Wajib Pajak untuk Meminjamkan Buku, Catatan dan Dokumen

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator penolakan WP meminjamkan buku, catatan dan dokumen sebesar 83,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, Wajib Pajak selalu memberikan buku, catatan dan dokumen yang diperlukan pemeriksa pajak.

5. Konfirmasi kepada Pihak Ketiga

Gambaran mengenai konfirmasi kepada pihak ketiga pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Pemeriksaan ulang bila ada kesalahan prosedur	F %	11 36,7	13 43,3	4 13,3	2 6,7	0 0,0	123	150	82,00
2	Dalam pemeriksaan pajak minta bantuan dari pihak ketiga	F %	2 6,7	20 66,7	6 20,0	2 6,7	0 0,0	112	150	74,67
	% Skor Aktual Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga							235	300	78,33

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi konfirmasi kepada pihak ketiga sebesar 78,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya pemeriksa dalam pemeriksaan pajak selalu mengadakan kofirmasi dengan pihak ketiga. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk konfirmasi kepada pihak ketiga dijelaskan sebagai berikut :

1). Pemeriksaan Ulang

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pemeriksaan ulang sebesar 82,00%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, pemeriksaan selalu diulang apabila ada kesalahan dalam pemeriksaan pajak

2). Bantuan dari pihak ketiga

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator bantuan dari pihak ketiga sebesar 74,67%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pajak selalu minta bantuan pada pihak ketiga.

6. Melakukan pemberitahuan akhir hasil pemeriksaan

Gambaran mengenai pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Pemberitahuan Akhir hasil Pemeriksaan

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Hasil pemeriksaan diberi-tahukan kepada WP	F %	12 40,0	14 46,7	3 10,0	1 3,3	0 0,0	127	150	84,67
2	Hasil pemeriksaan disetujui WP	F %	6 20,0	15 50,0	3 10,0	6 20,0	0 0,0	111	150	74,00
	% Skor Aktual Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ke WP							238	300	79,33

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi pemberitahuan akhir hasil pemeriksaan sebesar 79,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya hasil pemeriksaan akhir selalu diberitahukan kepada wajib pajak. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk pemberitahuan hasil akhir kepada WP dijelaskan sebagai berikut :

1). Pemberitahuan Hasil Akhir Pemeriksaan Kepada WP

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator pemberitahuan hasil akhir sebesar 84,67%, termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya, hasil akhir pemeriksaan selalu diberitahukan kepada Wajib Pajak

2). Hasil Pemeriksaan Disetujui Wajib Pajak

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator hasil pemeriksaan disetujui wajib pajak sebesar 74,00%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, hasil pemeriksaan pajak selalu disetujui oleh wajib pajak.

7. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Gambaran mengenai pembahasan akhir hasil pemeriksaan kepada WP pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Seluruh hasil pemerik-saan diberitahukan kepada WP	F %	4 13,3	18 60,0	5 16,7	3 10,0	0 0,0	113	150	72,33
2	Hasil pemeriksaan ditolak WP	F %	4 13,3	12 40,0	8 26,7	6 20,0	0 0,0	104	150	69,33
	% Skor Aktual Pembahasan akhir hasil pemeriksaan							217	300	72,33

Pada Tabel 4.10 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar 72,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya hasil pemeriksaan akhir selalu diadakan pembahsan tentang hasil pemeriksaan. Persentase skor tanggapan responden pada masing-masing indikator yang membentuk pembahasan akhir hasil hasil pemeriksaan dijelaskan sebagai berikut :

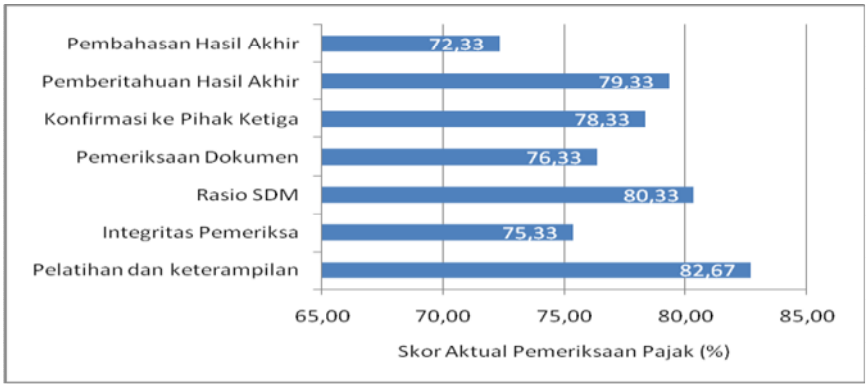
1). Seluruh Hasil Pemeriksaan Pemberitahuan Hasil Akhir Pemeriksaan Kepada WP

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator seluruh hasil pemeriksaan sebesar 69,33%, termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya, seluruh hasil akhir pemeriksaan selalu diberitahukan kepada Wajib Pajak

2). Hasil Pemeriksaan Ditolak Wajib Pajak

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator hasil pemeriksaan ditolak wajib pajak sebesar 74,00%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, hasil pemeriksaan pajak sebagian besar disetujui oleh wajib pajak.

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap dimensi pelatihan dan keterampilan, integritas pemeriksa, rasio sumber daya manusia (SDM), pemeriksaan dokumen, konfirmasi dengan pihak ketiga, pemberitahuan hasil akhir pemeriksaan dan pembahasan hasil akhir pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Histrogram Tanggapan Responden terhadap Pemeriksaan Pajak

Tabel 4.11
Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak
Per KPP Pratama

No	Nama KPP	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Keterangan
1	KPP Karees	147	210	70%	Baik
2	KPP Cicadas	158	210	75,2%	Baik
3	KPP Cibeunying	166	210	79%	Baik
4	KPP Bojonegara	167	210	79%	Baik
5	KPP Cimahi	164	210	78%	Baik
6	KPP soreang	152	210	72%	Baik
7	KPP Majalaya	168	210	80%	Baik
8	KPP Sumedang	173	210	82%	Baik
9	KPP Tegalega	180	210	85%	Sangat Baik
10	KPP Madya	159	210	75%	Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Tidak baik (36,2%-52,3%)
e. Sangat tidak baik (0,00%-36,10%)

Berdasarkan tabel 4.11 pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Kanwil Jabar I sudah dalam katagori baik seperti pada KPP Karees, KPP Cicadas, KPP Cibeunying, KPP Bojonegara, KPP Cimahi, KPP Soreang dan KPP Madya, KPP Majalaya, KPP Sumedang sedangkan KPP Tegalega termasuk dalam katagori sangat baik.

4.3.2 Analisis Deskripsi Kepatuhan Pajak

Gambaran kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I

Variabel Kepatuhan Pajak	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen (%)	Kriteria
1. Kejujuran dan kelengkapan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT)	232	300	77,33	Baik
2. Penyampaian SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir	221	300	73,67	Baik
Total Skor Kepatuhan Pajak (Y)	453	600	75,50	Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Tidak baik (36,2%-52,3%)
e. Sangat tidak baik (0,00%-36,10%)

Berdasarkan data Tabel 4.12 tersebut menunjukkan bahwa tanggapan yang diberikan responden pegawai di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kanwil Jabar I, dalam hal kepatuhan pajak termasuk katagori baik, dengan skor aktual data pemeriksaan sebesar 75,50%, dari skor ideal.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi kepatuhan pajak :

1. Kejujuran dan kelengkapan dalam mengisi SPT

Gambaran mengenai kejujuran dan kelengkapan dalam pengisian SPT pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Kejujuran dan Kelengkapan Dalam Mengisi SPT

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Kejujuran wajib pajak dalam mengsisi SPT	F %	4 13,3	18 60,0	5 16,7	3 10,0	0 0,0	119	150	79,33
2	Kelengkapan wajib pajak dalam mengisi SPT	F %	4 13,3	12 40,0	8 26,7	6 20,0	0 0,0	113	150	75,33
	% Skor Aktual Kejujuran dan kelengkapan dalam mnegisi SPT							232	300	77,33

Dari Tabel 4.13 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi kejujuran dan kelengkapan dalam mengsi SPT sebesar 77,33% dan termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak dalam mengisi SPT sudah berlaku jujur dan lengkap dalam pengsisian SPT.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi kejujuran dan kelengkapan dalam mengsisi SPT :

1). Kejujuran dalam mengisi SPT

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator kejujuran dalam mengsi SPT sebesar 79,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, wajib pajak sudah berlaku jujur dalam mengsisi SPT

2). Kelengkapan dalam mengisi SPT

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator kelengkapan dalam mengsi SPT sebesar 75,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, wajib pajak dalam mengsisi SPT sudah tergolong lengkap

2. Penyampaian SPT

Gambaran mengenai penyampaian SPT pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Penyapaian SPT sampai Batas Waktu Terakhir

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Ketepatan penyampaian SPT	F %	4 13,3	24 80,0	1 3,3	1 3,3	0 0,0	104	150	69,33
2.	Penyampaian SPT sebelu batas waktu terakhir	F %	9 30,0	18 60,0	2 6,7	1 3,3	0 0,0	117	150	78,00
	% Skor Aktual Penyampaian SPT							221	300	73,67

Pada Tabel 4.14 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi penyampaian SPT sebesar 73,67% dan termasuk kategori baik. Artinya penyampaian SPT oleh wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi penyampaian SPT oleh wajib pajak :

1). Penyampaian SPT tepat waktu

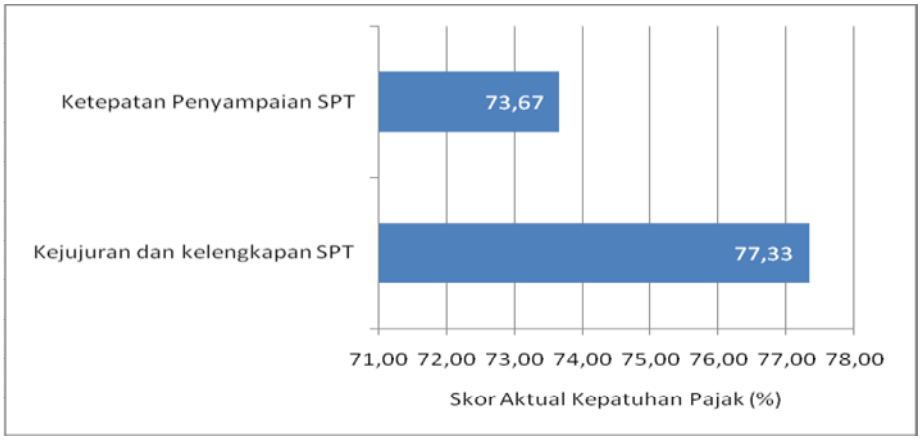
Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator penyampaian SPT tepat waktu sebesar 69,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, penyampaian SPT oleh wajib pajak sebagain besar disampaikan tepat waktu.

2) Penyampaian SPT pada batas waktu terakhir

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator penyampaian pajak pada batas waktu terakhir sebesar 78,00%, termasuk dalam kategori baik.

Artinya, penyampaian SPT oleh wajib pajak disampaikan sebelum batas waktu terakhir

Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap kepatuhan pajak oleh wajib pajak pada KPP di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2
Histrogram Tanggapan Responden terhadap Kepatuhan Pajak

Tabel 4.15
Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Pajak
Per KPP Pratama

No	Nama KPP	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Keterangan
1	KPP Karees	36	60	60%	Cukup Baik
2	KPP Cicadas	41	60	68%	Cukup Baik
3	KPP Cibeunying	49	60	81,6%	Baik
4	KPP Bojonegara	47	60	78%	Baik
5	KPP Cimahi	47	60	78%	Baik
6	KPP soreang	47	60	78%	Baik
7	KPP Majalaya	41	60	68%	Cukup Baik
8	KPP Sumedang	51	60	85%	Sangat Baik
9	KPP Tegalega	48	60	80%	Baik
10	KPP Madya	46	60	76%	Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Tidak baik (36,2%-52,3%)
e. Sangat tidak baik (0,00%-36,10%)

Berdasarkan tabel 4.15 pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Kanwil Jabar I sudah dalam katagori cukup baik seperti pada KPP Karees, KPP Cicadas, KPP Majalaya, pada KPP Cibeunying, KPP Bojonegara, KPP Cimahi, KPP Soreang, KPP Tegalega, dan KPP Madya berada dalam katagori baik sedangkan pada KPP Sumedang termasuk dalam katagori sangat baik.

4.3.3 Analisis Deskripsi *Self Assesment Sistem*

Gambaran *Self Assesment Sistem* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Mengenai *Self Assesment Sistem*
pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kanwil Jabar I

Variabel *Self Assesment Sistem*	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen (%)	Kriteria
1. Peran aktif Wajib pajak	231	300	77,00	Baik
2. Tanggung jawab Wajib pajak atas perpajakan	220	300	73,33	Baik
3. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah/ instansi terhadap kewajiban pajak	218	300	72,67	Baik
Total Skor *Self Assesment Sistem* (Z)	669	900	74,33	Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Tidak baik (36,2%-52,3%)
e. Sangat tidak baik (0,00%-36,10%)

Dari hasil angket yang diberikan responden pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I, menunjukkan bahwa *Self Assesment Sistem* termasuk katagori baik, dengan skor aktual *self assesment system* sebesar 74,33%, dari skor ideal.

Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi *Self Assesment Sistem*:

1 Peran aktif Wajib Pajak

Gambaran mengenai peran aktif wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Aktif WP

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Wajib pajak menyetor SPT pada tempat yang sudah ditentukan	F %	5 16,7	19 63,3	5 16,7	1 3,3	0 0,0	118	150	78,67
2.	Wajib pajak mengetahui kapan lapor kewajiban pajaknya	F %	3 10,0	19 63,3	6 20,0	2 6,7	0 0,0	113	150	75,33
	% Skor Aktual Dimensi Peran aktif Wajib Pajak (WP)							231	300	77,00

Pada Tabel 4.17 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi peran serta aktif w/.lajib pajak sebesar 77,00% dan termasuk kategori baik. Artinya wajib pajak pada KPP di Wilayah Kanwil Jabar I pada umumnya sudah dapat berperan aktif dalam perpajakannya. Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi peran aktif wajib pajak :

1) Wajib Pajak menyetor pada tempat yang sudah ditentukan

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator wajib pajak meyetor pada tempat yang sudah ditentukan sebesar 78,67%, termasuk dalam kategori

baik. Artinya, sebagain besar wajib pajak sudah menyetor kewajiban perpajakannya pada tempat yang sudah ditentukan

2) Wajib pajak mengetahui kapan lapor kewajiban perpajakannya

Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator kapan menyetor kewajibannya sebesar 75,33%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, wajib pajak sudah mengetahui kapan harus lapor kewajiban perpajakannya.

2 Tanggung Jawab WP atas Perpajakan

Gambaran mengenai tanggung jawab perpajakan oleh WP pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I terangkum pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Tanggung Jawab WP atas Perpajakan

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	WP memberikan dokumen yang diperlukan pemeriksa	F %	5 16,7	23 76,7	1 3,3	1 3,3	0 0,0	112	150	74,67
2.	WP membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang	F %	5 16,7	20 66,7	2 6,7	3 10,0	0 0,0	108	150	72,00
	% Skor Aktual Dimens Tanggung Jawab WP atas Perpajaknya							220	300	73,33

Pada Tabel 4.18 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi tanggung jawab WP dalam pepajakan sebesar 73,33% dan termasuk kategori baik. Artinya wajib pajak mempunyai tanggung jawab atas perpajakannya Berikut ini merupakan tanggapan responden

terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi tanggung jawab WP dalam perpajakannya :

1) WP memberikan dokumen yang diperlukan pemeriksa

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator WP memberikan dokomen yang diperlukan pemeriksa sebesar 74,67%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, setiap pemeriksaan wajib pajak selalu memberikan dokumen yang diperlukan pemeriksa

2) WP membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator WP membayar paja sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar 72,00%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, WP telah membayar kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

3 Pembinaan dan Pengawasan

Gambaran mengenai pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah/instansi terkait pada KPP di Wilayah Kanwil Jabar I dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai
Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah/Instansi Terkait

No	Item Pertanyaan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1.	Instasi melakukan sosiali-sasi cara pengisian SPT	F	8	19	1	2	0	115	150	76,67
		%	26,7	63,3	3,3	6,7	0,0			
2.	Frekuensi sosialisasi cara pengisian SPT	F	9	14	1	6	0	103	150	68,67
		%	30,0	46,7	3,3	20,0	0,0			
	% Skor Aktual Dimensi Pembinaan dan Pengawasan							218	300	72,67

Pada Tabel 4.19 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas butir pernyataan yang membentuk dimensi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah/instansi terkait sebesar 71,67% dan termasuk kategori baik. Artinya pembinaan dan pengawasan oleh peerintah/instansi terkait pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I pada umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut ini merupakan tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi pembinaan dan pengawasan :

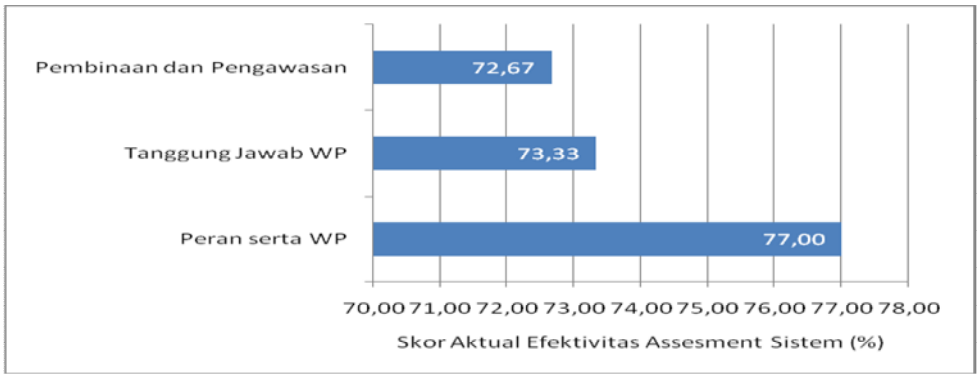
1) Instansi melakukan sosialisasi cara pengisian SPT

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator sosialisi pengisian SPT oleh instansi tekait sebesar 76,67%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, instansi telah melaksanakan sosialisasi cara pengisian SPT kepada wajib pajak dengan baik

2) Frekuensi sosialisasi cara pengsisian SPT

   Persentase skor tanggapan responden mengenai indikator frekuensi sosialisasi cara pengisian SPT oleh instansi terkait sebesar 68,67%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, instansi telah melakukan sosialisasi pengisian SPT kepada wajib pajak sebanyak 3 kali dalam setahun

   Untuk lebih jelasnya tanggapan responden terhadap *Self Assessment system* (peran aktif WP, tanggung jawab WP, dan pembinaan dan pengawasan) pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3
Tanggapan Responden terhadap *Self Assesment Sistem*

Tabel 4.20
Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai *Self Assesment System*
Per KPP Pratama

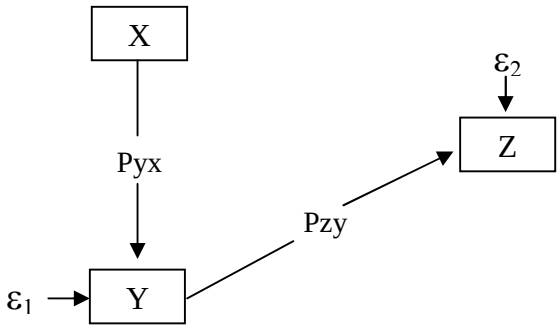
No	Nama KPP	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Keterangan
1	KPP Karees	61	90	**67.7%**	Cukup Baik
2	KPP Cicadas	66	90	**73%**	Baik
3	KPP Cibeunying	65	90	**72%**	Baik
4	KPP Bojonegara	72	90	**80%**	Baik
5	KPP Cimahi	68	90	**75%**	Baik
6	KPP soreang	52	90	**57%**	Cukup Baik
7	KPP Majalaya	67	90	**74%**	Baik
8	KPP Sumedang	71	90	**78%**	Baik
9	KPP Tegalega	73	90	**81%**	Baik
10	KPP Madya	74	90	**82%**	Baik

Keterangan : a. Sangat baik (84,8%-100%), b. Baik (68,80%-84,7%)
c. Cukup baik (52,4%-68,7%) d. Tidak baik (36,2%-52,3%)
e. Sangat tidak baik (0,00%-36,10%)

Berdasarkan tabel 4.20 pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Kanwil Jabar I sudah dalam katagori cukup baik seperti pada KPP Karees, KPP soreang baik sedangkan pada KPP Cicadas, KPP Cibeunying, KPP Bojonegara, KPP Cimahi, KPP Majalaya, KPP SSumedang, KPP Tegalega, KPP Madya termasuk dalam katagori baik.

4.4. Analisis Verifikatif

Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak, dan kepatuhan pajak terhadap *Self Assesment Sistem*. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh kepatuhan pajak terhadap *self assessment system*. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4.4
Model Analisis Jalur

Gambar diagram jalur seperti terlihat di atas dapat diformulasikan kedalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut :

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama :

$$Y = Pyx\ X + \varepsilon_1$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua :

$$Y = Pzy\ Y + \varepsilon_2$$

Keterangan :
X = Pemeriksaan Pajak
Y = Kepatuhan Pajak
Z = *Self Assesment Sistem*
PYX = Koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak
PZY = Koefisien jalur kepatuhan pajak terhadap *Self Assesment Sistem*
 = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penelitian (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap *self assessment system* terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Dari data masing-masing variabel, diperoleh rekap data untuk perhitungan analisis jalur dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan *software* SPSS 20 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke Tabel interpretasi koefisien korelasi berikut :

Tabel 4.21
Katagori Koefisien Korelasi (r) Metode Guliford

No.	Besarnya Pengaruh	Katagori
1.	0,00 – 0,20	Sangat longgar dapat diabaikan
2.	0,21 – 0,40	Rendah
3.	0,41 – 0,60	Sedang/Cukup
4.	0,61 – 0,80	Erat/Kuat
5.	0,81 – 1,00	Sangat Erat/Sangat kuat

Sumber : Umi Narimawati (2010:52)

4.4.1 Keterkaitan Antar Variabel

Untuk mengetahui korelasi antara variabel pemeriksaan pajak (X) dengan kepatuhan pajak (Y) dan antara kepatuhan pajak (Y) dengan *Self Assesment Sistem* (Z). Hasil analisis korelasi antara variabel yang diteliti dapat dilihat pada Tabel 4.19, dan Lampiran 4.

Tabel 4.22
Koefisien Korelasi antara Variabel X dengan Y, dan Y dengan Z

Pearson Correlation		t_{hitung}	$t_{0.05(30-2)}$	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
rXY	0,680	4,907	2,048	0,000	H_0 ditolak, terdapat hubungan sangat erat antara pemeriksaab pajak (X) dengan kepatuhan pajak (Y)
rYZ	0,492	2,990	2,048	0,006	H_0 ditolak, terdapat hubungan erat antara kepatuhan pajak (Y) dengan *Self Assesment Sistem* (Z)

Sumber : Analisis Data (2012)

Berdasarkan nilai koefisien korelasi di atas dapat dilihat bahwa keterkaitan atau hubungan antara pemeriksaan pajak (X) dangan kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,680 dan masuk dalam kategori erat. Arah hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang baik cenderung diikuti dengan kepatuhan pajak yang baik. Kemudian hubungan antara kepatuhan pajak (Y) dengan *Self Assesment Sistem* (Z) sebesar 0,492 juga termasuk dalam kategori sangat cukup erat, dengan arah hubungan positif, hal ini menunjukkan bahwa dengan kepatuhan pajak yang baik cenderung diikuti dengan *Self Assesment Sistem* yang baik pula.

4.4.2. Pengujian Jalur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel pemeriksaan pajak berperan sebagai variabel independen (*eksogenus variable*) dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (pemeriksaan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$P_{YX} = r_{XY} = 0{,}680$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak berikut

Tabel 4.23
Koefisien Jalur Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.334	1.773		1.316	.199
	Pemeriksaan pajak (X)	.219	.045	.680	4.907	.000

a. Dependent Variable:Kepatuhan Pajak (Y)

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,680 pada Tabel 4.23 merupakan nilai koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I.

2. Keoefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$P_{YX}^2 = r_{XY}^2 = (0,680)^2 = 0,462$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai berikut:

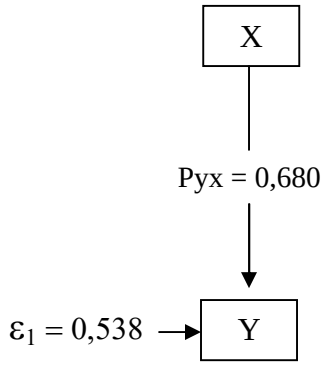
Tabel 4.24
Koefisien Determinasi Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680	.462	.443	1.9073

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X)

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 46,20% terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I, sementara sisanya sebesar 53,80% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar pemeriksaan pajak yang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5
Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara parsial. Pada pengujian parsial, apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka H_0 diterima.

Hopotesis :

$H_0 = P_{YX} = 0$: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

$H_a = P_{YX} \neq 0$: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada Tabel 4.25 diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,680. Karena koefisien jalur pemeriksaan pajak (0,680) lebih besar dari nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I**.**

4.4.3 Pengujian Jalur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel kepatuhan pajak berperan sebagai variabel independen (*eksogenus variable*) dan *Self Assesment Sistem* sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Selanjutnya untuk menguji pengaruh kepatuhan pajak terhadap *Self Assesment Sistem* ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (kepatuhan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$P_{ZY} = r_{YZ} = 0{,}492$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien jalur kepatuhan pajak terhadap *Self Assesment Sistem* sebagai berikut :

Tabel 4.25
Koefisien Jalur Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assesment System*

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.318	2.079		4.483	.000
	Kepatuhan Pajak (Y)	.557	.186	.492	2.987	.006

a. Dependent Variable: *Self Assesment Sistem* (Z)

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,492 pada Tabel 4.22 merupakan nilai koefisien jalur kepatuhan pajak terhadap *Self Assesment Sistem*.

Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel kepatuhan pajak terhadap *self assessment system* pada KPP di Wilayah Kanwil Jabar I

2. Keoefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$P_{ZX}^2 = r_{YZ}^2 = (0,492)^2 = 0,471$

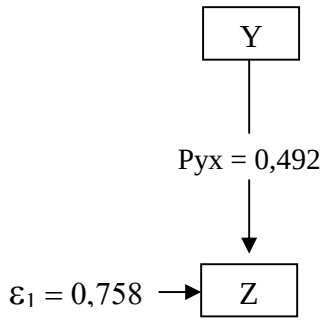
Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh koefisien determinasi kepatuhan pajak terhadap *Self Assesment Sistem* sebagai berikut:

Tabel 4.26
Koefisien Determinasi Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assesment Sistem*
`Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.492[a]	.242	.215	2.56528

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pajak (Y)

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kepatuhan pajak memberikan pengaruh sebesar 0,242 terhadap *Self Assesment Sistem* pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kepatuhan pajak yang diteliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6
Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

3. Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap *Self Assesment Sistem,* maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara parsial. Pada pengujian parsial, apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka H_0 diterima.

Hopotesis :

$H_0 = P_{ZY} = 0$: Kepatuahun pajak tidak berpengaruh terhadap *Self Assesment Sistem*

$H_a = P_{ZY} =/ 0$: Kepatuahun pajak berpengaruh terhadap *Self Assesment Sistem*

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada Tabel 4.23 diperoleh koefisien jalur kepatuan pajak terhadap *Self Assesment Sistem* sebesar 0,492. Karena koefisien jalur kepatuhan pajak (0,492) lebih besar dari nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap *Self Assesment Sistem* pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I**.**

4.4.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 46,20% terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I, sementara sisanya sebesar 53,80% dipengaruhi oleh faktor-faktor. Berdasarkan analisis deskriptif pemeriksaan pajak berada pada katagori baik sedangkan kepatuhan pajak berada pada kategori baik. tetapi masih ada Di lihat dari faktor pendidikan dan pelatihan teknis yang sudah baik serta jumlah SDM yang sudah baik dalam melakukan pemeriksaan pajak hal tersebut memicu meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. walaupun fenomena yang terjadi menurut Fuad Rachmany pada tahun 2011 hasil pemeriksaan menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak terutama institusi maupun lembaga pemerintah yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. karena itu masih perlu ditingkatkan menjadi katagori baik ideal. Dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I perlu mempertimbangkan indikator variabel pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Dalam variabel pemeriksaan pajak, kualitas auditor, teruma dalam integritas auditor perlu ditingkatkan lagi, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
2. Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang perlu ditingkatkan adalah indikator jumlah pemeriksa pajak, hal ini karena beban kerja yang ditanggung oleh pemeriksa harus disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada pada pemeriksa. Jika tidak bisa menyesuaikan jumlah SDM maka harus diatasi dengan melengkapinya dengan teknologi informasi dalam pemeriksaan.

3. Kelengkapan dalam pengisian SPT perlu lebih ditingkatkan lagi, dengan cara mensolisasikan cara pengisian SPT selengkapnya kepada wajib pajak
4. Ketepatan penyampaian SPT, terutama penyampaian SPT oleh wajib pajak perlu ditingkatkan, dengan cara mensolisasikan kepada wajib pajak agar dapat menyampaikan SPT sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh koefisien jalur pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I.

4.4.5 Pengaruh Kepatuhan Pajak dan *Self Assesment Sistem*

dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kepatuhan pajak memberikan pengaruh sebesar 24,2% terhadap *Self Assesment Sistem* pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I, sementara sisanya sebesar 75,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan analisis deskriptif kepatuhan pajak berada pada katagori baik, sedangkan *Self Assesment Sistem* berada pada kategori cukup. Di lihat dari faktor peran aktif wajib pajak setra kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian SPT. Walaupun fenomena yang ada Kepatuhan membayar pajak di indonesia masih sangat rendah di banding dengan negara" di asia tenggara. (Adinur Prasetyo,2008). Kesadaran warga Kab. Bandung dalam membayar pajak juga masih sangat rendah masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya (H. Dadang M,2012). Namun masih perlu ditingkatkan menjadi katagori baik ideal. Dalam peningkatan *Self Assesment Sistem* pada KPP Pratama di Wilayah Kanwil Jabar I perlu mempertimbangkan indikator variabel kepatuhan pajak dan *Self Assesment Sistem* yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Peran serta wajib pajak perpajakannya, teruma dalam ketepatan dalam memberikan laporan SPT tepat pada waktu yang telah ditentukan.
2. Tanggung jawab wajib pajak perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan semua dokumen yang diperlukan pemeriksa, serta mengisi SPT dengan selengkap mungkin

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh koefisien jalur kepatuhan pajak terhadap *Self Assesment Sistem* sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap *Self Assesment Sistem* pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung**.**

4.3.4.3 Seberapa Besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dan Implikasinya Terhadap *Self Assesment System*

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dalam kriteria baik sedangkan pengaruh kepatuhan pajak terhadap *self assesment system* dalam kriteria cukup. Di lihat dari faktor pendidikan dan pelatihan teknis yang sudah baik serta jumlah SDM yang sudah baik dalam melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini memicu peningkatan peran aktif wajib pajak dan tanggung jawab wajib pajak atas perpajakannya sehingga pelaksanaan *self assesment* pun berjalan dengan cukup baik. Namun fenomena yang ada sekarang masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga masih banyak target sasaran pemeriksaan yang pelru ditingkatkan seperti dalam fenomena yang ada. Sehingga masih perlu ada peningkatan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk meningkatkan kepatuhan dan juga agar pelaksanaan *self assesment* berjalan dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa bila pemeriksaan pajak dilakukan secara profesional, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyetor perpajakannya, dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka dapat meningkatkan *Self Assesment Sistem*. Hal tersebut karena salah satu tujuan dari pemeriksaan adalah kepatuhan pajak, dengan kepatuhan maka *Self Assesment Sistem* meningkat pula.